

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Meningkatnya berbagai metode kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai medianya seperti *Image Based Sexual Abuse* (IBSA) menjadi hal yang tak terhindarkan seiring dengan semakin umumnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selama kurang lebih 5-6 tahun belakangan ini, telah banyak negara yang sudah menyusun peraturan pidana bagi IBSA (kecuali Filipina yang sudah jauh lebih dulu menyusun peraturan perundangan terkait ISBA). Hal penting yang sudah diatur di kebanyakan peraturan IBSA di negara lain (dan juga direkomendasikan oleh Mary Anne Franks) adalah memasukkan konsep persetujuan ke dalam unsur pasal pidana IBSA.

Berdasarkan regulasi, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara UU ITE dan UU Pornografi dengan regulasi IBSA di negara-negara lain dan juga panduan pembentukan peraturan IBSA Franks terutama dalam hal definisi gambar seksual pribadi (yang di dalam UU ITE disebutkan sebagai “melanggar kesusilaan” dan dalam UU Pornografi menggunakan kata “pornografi” yang problematik) serta konsep persetujuan. Konsep persetujuan yang disranakna oleh Franks maupun terdapat dalam regulasi IBSA negara lain menyebutkan bahwa persetujuan harus dibedakan menjadi dua yakni persetujuan saat gambar diambil dan persetujuan saat gambar disebar. Ini berarti tidak otomatis ketika seseorang menyetujui gambar seksual pribadinya diambil lalu lantas diartikan ia memberikan izin untuk penyebaran gambar tersebut. Selain untuk melindungi korban, adanya unsur persetujuan pemilik gambar ini penting untuk menghindari kriminalisasi orang yang tidak tepat dalam artian bila gambar tersebut memang dibuat untuk diperlihatkan pada publik. Namun di samping UU ITE dan UU Pornografi, terdapat juga UU Perlindungan Saksi dan Korban yang secara substansi memiliki peran penting dalam perlindungan korban.

Berkaitan dengan praktik perlindungan bagi korban, oleh karena peraturan IBSA di negara-negara lain kebanyakan masih terhitung baru, masih terdapat banyak kekurangan dalam hal praktik penegakan hukum dan perlindungan korban IBSA

seperti kurangnya SDM kepolisian yang berperspektif gender, kurangnya tenaga ahli *digital forensic*, minimnya jumlah peralatan untuk melakukan *digital forensic*, serta kurangnya edukasi masyarakat akan IBSA. Namun di sisi lain juga terdapat perkembangan yang diupayakan oleh baik negara, NGO, maupun pihak swasta seperti media melalui edukasi di lingkungan pendidikan tentang IBSA, upaya pencegahan pengunggahan konten yang dicurigai sebagai gambar seksual pribadi seperti yang baru diupayakan oleh Facebook, dan lainnya. Praktik penegakan hukum terkait kasus IBSA di Indonesia dapat dikatakan menghadapi masalah yang sama terutama dalam hal SDM dan infrastruktur. Namun, Indonesia juga mengalami persoalan di bidang KUHAP, khususnya di kewenangan penetapan tersangka.

4.2 Saran

Kesenjangan yang terjadi antara peraturan terkait IBSA di Indonesia dengan di negara lain dapat diatasi dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang telah ada sekarang seperti UU ITE dan UU Pornografi. Perlu adanya perbaikan dalam penggunaan istilah seperti “pornografi” ataupun “melanggar kesusilaan”. Selain itu perlu juga untuk mempertimbangan pemidanaan hanya untuk penyebaran gambar seksual yang disebar untuk tujuan komersil atau untuk merugikan orang lain sehingga peraturan yang ada tidak bisa digunakan untuk mengkriminalisasi korban IBSA. Selain kedua UU tersebut, perlu juga mempertimbangkan memperluas kewenangan HPP dalam hal penetapan tersangka untuk mencegah kewenangan absolut penyidik yang justru dapat mengancam korban IBSA.

Dari segi praktik, meskipun contoh-contoh praktik yang dilakukan di negara lain belum sempurna, penting bagi Indonesia untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi APH terkait *digital forensic* dan cara menangani kasus dengan perspektif gender yang baik. Hal ini penting mengingat metode dan jenis tindak pidana semakin berkembang seiring dengan semakin maraknya penggunaan internet. Selain itu, penting juga bagi Indonesia untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk peralatan *digital forensic* agar kepolisian di seluruh daerah memiliki peralatan untuk melakukan *digital forensic* (tidak terbatas hanya di Mabes POLRI). Di luar kedua hal itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti NGO dan pengelola media sosial besar untuk mengadakan pendidikan terkait IBSA di lingkungan institusi

pendidikan maupun secara umum dan mencari cara-cara pencegahan bagi IBSA di media sosial.

Terakhir, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam hal perspektif APH dalam menangani kasus IBSA atau peran rancangan peraturan seperti RKUHP, RKUHAP, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam penyelesaian kasus IBSA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Peraturan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

B. Skripsi

Aliya, Rizkina. "Analisis Hukum Kritis dengan Perspektif Feminis terhadap Penyebaran Atas Pornografi Tanpa Persetujuan di Indonesia." Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

C. Jurnal

Britton, Dana M. "Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 571, Feminist Views of the Social Sciences* (2000):57-76. www.jstor.org/stable/1049134

DeKeseredy, Walter S. dan Martin D. Schwartz. "Thinking Sociologically About Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male." *Peer Support Theory, Sexualization, Media, & Society* (2016): 2. doi: 10.1177/2374623816684692

Eaton, Asia A., Holly Jacobs, dan Yanet Ruvalcaba, *2017 Nationwide Online Study of Nonconsensual Porn Victimization and Perpetration: a Summary Report*, Amerika: Cyber Civil Rights Initiative, 2017.

Kirchengast, Tyrone dan Thomas Crofts. "The Legal And Policy Contexts of 'Revenge Porn' Criminalisation: The Need For Multiple Approaches." *Oxford University Commonwealth Law Journal* (2019):1-29. Diakses 25 Januari 2020. doi: 10.1080/14729342.2019.1580518

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019)
- Lageson, Sarah Esther, Suzy McElrath dan Krissinda Ellen Palmer. "Gendered Public Support for Criminalizing "Revenge Porn"." *Feminist Criminology* 1-4 (2018): 560-583. doi: 10.1177/1557085118773398
- Maculan, Elena dan Alicia Gil Gil. "The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Context." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 40, No. 1 (2020): 136. doi:10.1093/ojls/gqz033
- Maddocks, Sophie. "From Non-consensual Pornography to Image-based Sexual Abuse: Charting the Course of a Problem with Many Names." *Australian Feminist Studies* (2018): 345-361. Diakses 4 April 2020. doi: 10.1080/08164649.2018.1542592
- McGlynn, Clare dan Erika Rackley. "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 3 (2017). doi:10.1093/ojls/gqw033.
- O'Connell, A. "Image Rights And Image Wrongs: Image-Based Sexual Abuse And Online Takedown." *Journal Of Intellectual Property Law & Practice* 15(1) (2019): 55-65. doi:10.1093/jiplp/jpz150
- Powell, Anastasia, Nicola Henry, Asher Flynn, dan Adrian J. Scott. "Image-based sexual abuse: The extent, nature, and predictors of perpetration in a community sample of Australian adults," *Computers in Human Behavior* (2018): 2-3, doi: 10.1016/j.chb.2018.11.009.
- Ruvalcaba, Yanet dan Asia Eaton, "Nonconsensual Pornography Among U.S. Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men. *Psychology of Violence*." *Psychology of Violence* (2019): 68-78. doi: 10.1037/vio0000233.

D. Website

- Adinda, Permata. "SAFEnet: Makna Kesusilaan Tidak Jelas dan Bias Gender." *Asumsi.co*, 7 Maret 2020. Diakses 31 Mei 2020.

<https://www.asumsi.co/post/safenet-makna-kesusilaan-tidak-jelas-dan-bias-gender>

Avery, Rebecca. “‘Step Up, Speak Up’ New Resources to help Secondary Schools Tackle Sexual Harassment Online.” *Theeducationpeople.org*, 15 Maret 2019. Diakses 8 Agustus 2020. <https://www.theeducationpeople.org/blog/step-up-speak-up-new-resources-to-help-secondary-schools-tackle-sexual-harassment-online/>

_____, “About eSafety.” *Esafety.gov.au*. Diakses 23 Agustus 2020. <https://www.esafety.gov.au/about-us/who-we-are>

_____, “Apa yang bisa dilakukan jika ada yang memeras saya di Instagram?” *Instagram.com*. Diakses 23 Agustus 2020. <https://help.instagram.com/1443273235892548?helpref=search&sr=7&query=What%20are%20the%20requirements%20to%20apply%20for%20a%20verified%20badge%20on%20Instagram%3F%20>

_____, “GDPR: Right to be Forgotten.” *gdpr-info.eu*. Diakses 4 September 2020, <https://gdpr-info.eu/issues/right-to-be-forgotten/>

_____, “Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM.” *Icjr.or.id*, 2 Mei 2013. Diakses 27 Agustus 2020. <https://icjr.or.id/konsep-hakim-pemeriksa-pendahuluan-hpp-dalam-rancangan-kuhap-belum-jadi-solusi-perlindungan-ham/>

_____, “Law On Image-Based Sexual Abuse And Online Takedown Not Fit For Purpose.” *Royalholloway.ac.uk*, 13 Desember 2019. Diakses 7 Agustus 2020. <https://www.Royalholloway.Ac.Uk/About-Us/News/Law-On-Image-Based-Sexual-Abuse-And-Online-Takedown-Not-Fit-For-Purpose/>

_____, “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.” *Komnasperempuan.go.id*, 12 Maret 2019. Diakses 31 Maret 2020. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

- _____, "Revenge Porn: One In Three Allegations Dropped", *bbc.com*, 14 Juni 2018, diakses 30 Maret 2020, <https://www.bbc.com/news/uk-england-44411754>
- _____, "RUU Pornografi Disahkan dalam Suasana Kontroversial," *Hukumonline.com*, 30 Oktober 2008. Diakses 3 Februari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20405/ruu-pornografi-disahkan-dalam-suasana-kontroversial/>
- Boseley, Matilda. "Revenge Porn in Australia: the Law is Only as Effective as the Law Enforcement." *Theguardian.com*, 8 Mei 2020. Diakses 4 Agustus 2020. <https://www.theguardian.com/society/2020/may/09/revenge-porn-in-australia-the-law-is-only-as-effective-as-the-law-enforcement>
- Clarke, Joe. "Research Reveals Gendered Trends in Revenge Porn Crimes." *Swgfl.org.uk*, 23 Agustus 2019. Diakses 20 Mei 2020. <https://swgfl.org.uk/magazine/revenge-porn-research-2019/>
- Faruqi, Osman. "We're watching you': Why doxxing is the new weapon of choice for cyber bullies and trolls." *Abc.net.au*, 22 Februari 2019. Diakses 20 Mei 2020, <https://www.abc.net.au/news/2019-02-22/doxxing-the-new-weapon-of-choice-for-trolls/10833428>
- Franks, Mary Anne. "Drafting An Effective "Revenge Porn" Law: A Guide for Legislators." *SSRN.com*, 17 Agustus 2015. Diakses 4 Februari 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823
- Griffith, Jane. "Revenge Porn: Well-Known Celebrity Victims." *Nj.com*, 9 Januari 2015. Diakses 30 Maret 2020. https://www.nj.com/entertainment/2015/01/celebrity_revenge_porn_victims.html
- Gutierrez, Natashya. "Can the Philippines Gov't Protect You From Revenge Porn Hackers?" *Rappler.com*, 9 Februari 2018. Diakses 3 Agustus 2020. <https://rappler.com/newsbreak/in-depth/revenge-porn-hackers-cybercrime-cybersecurity-ph-israel>
- Jurecic, Quinta . "The Humiliation of Katie Hill Offers a Warning." *Theatlantic.com*, 31 Oktober 2019. Diakses 29 Maret 2020.

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/katie-hill-and-many-victims-r-venge-porn/601198/>

Lee, Jihye. “K-pop Suicide Sparks a Reckoning on Revenge Porn, Sexual Assault.” *Thejakartapost.com*, 29 November 2019. Diakses 30 Maret 2020. <https://www.thejakartapost.com/life/2019/11/29/k-pop-suicide-sparks-a-reckoning-on-revenge-porn-sexual-assault.html>

Marsh, Julia. “Revenge Porn Victim Wants US to Adopt ‘Right to be Forgotten’ Law.” *nypost.com*, 4 Januari 2017. Diakses 6 September 2020. <https://nypost.com/2017/01/04/revenge-porn-victim-wants-us-to-adopt-right-to-be-forgotten-law/>

McGlynn, Clare dan Erika Rackley. “Not ‘Revenge Porn’ but Abuse: Let’s Call It Image-Based Sexual Abuse.” *Everydayvictimblaming.com*, 9 Maret 2016. Diakses 15 Juli 2020. <http://www.everydayvictimblaming.com/media-complaints/not-revenge-porn-but-abuse-lets-call-it-image-based-sexual-abuse-by-%e2%80%8fmcglynnclare-erika-rackley/>

Miller, Michael E. “Revenge Porn: Charges Dropped in Miami Case, Raising Concerns Over Nationwide Legislation.” *Miaminewtimes*, 14 Oktober 2013. Diakses 30 Maret 2020, <https://www.miaminewtimes.com/news/revenge-porn-charges-dropped-in-miami-case-raising-concerns-over-nationwide-legislation-6529484>

Moore, Anna. “‘There’s no end and no escape. You feel so, so exposed’: life as a victim of revenge porn.” *Guardian.com*, 22 April 2019. Diakses 15 Mei 2020. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/sep/22/theres-no-end-and-no-escape-you-feel-so-so-exposed-life-as-a-victim-of-revenge-porn>

Nigam, Shradha. “Revenge Porn Laws across the World.” *Cis-india.org*, 25 April 2018. Diakses 26 Mei 2020. <https://cis-india.org/internet-governance/blog/revenge-porn-laws-across-the-world>

O’niell, Marnie. “US Political Staffer Adam Kuhn Resigns After Porn Star Ex Tweets Penis Pic.” *News.com.au*, 26 Juni 2014. Diakses 30 Maret 2020.

<https://www.news.com.au/technology/us-political-staffer-adam-kuhn-resigns-after-porn-star-ex-tweets-penis-pic/news-story/b877b66cb07e2b83f87b7612744a888e>

Puspita, Ratna. “Enam Tahun Ini, LPSK Lindungi 440 Korban Kekerasan Seksual.” *Republike.co.id*, 13 Mei 2020. Diakses 28 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/qaa3qp428/enam-tahun-ini-lpsk-lindungi-440-korban-kekerasan-seksual>

Robinson, Ben dan Nicola Dowling. “Revenge Porn Laws ‘Not Working’ Says Victim Group.” *Bbc.com*, 19 Mei 2019. Diakses 5 Agustus 2020. <https://www.bbc.com/news/uk-48309752>

Sahbani, Agus. “MK ‘Rombak’ Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan.” *Hukumonline.com*, 28 April 2015. Diakses 27 Agustus 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mkrombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan/#:~:text=Polemik%20penetapan%20tersangka%20sebagai%20salah,%20FPUU%20DXII%20F2014.&text=Mahkamah%20beralasan%20KUHAP%20tidak%20memberi,dan%20%E2%80%9Cbukti%20yang%20cupkup%E2%80%9D>.

Santo, Clianta de. “Bukan ‘Revenge Porn’ tetapi Kekerasan Seksual Berbasis Gambar.” *Magdalene.com*, 2 Agustus 2019. Diakses 2 April 2020. <https://magdalene.co/story/bukan-revenge-porn-tapi-kekerasan-seksual-berbasis-gambar>

Scammel, Robert. “EU’s Rights to be Forgotten Ruling Leaves Questions Unanswered.” *verdict.co.uk*, 24 September 2019. Diakses 6 September 2020. <https://www.verdict.co.uk/right-to-be-forgotten-ruling/#:~:text=The%20right%20to%20be%20forgotten,up%20in%20online%20search%20results>.

Smith, Hayden. “Revenge porn sentencing guidelines issued to courts for first time”. *Independent.co.uk*, 5 Juli 2018. Diakses 26 Mei 2020, <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revenge-porn-sentencing-council-guidelines-courts-social-media-websites-a8431981.html>

Sohuturon, Martahan. “Hakim Tolak Gugurkan Status Tersangka Luna Maya dan Cut Tari.” *cnnindonesia.com*, 7 Agustus 2018. Diakses 7 September 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180807121840-12-320173/hakim-tolak-gugurkan-status-tersangka-luna-maya-dan-cut-tari>

Solon, Olivia. “Inside Facebook’s Efforts to Stop Revenge Porn Before It Spreads.” *Nbcnews.com*, 18 November 2019. Diakses 9 Agustus 2020. <https://www.nbcnews.com/tech/social-media/inside-facebook-s-efforts-stop-revenge-porn-it-spreads-n1083631>

Wang, Vivian. “‘Revenge Porn’ Law Finally Passes in New York.” *Nytimes.com*, 28 Februari 2019. Diakses 26 Mei 2020. <https://www.nytimes.com/2019/02/28/nyregion/revenge-porn-law.html>

Zoledziowski, Anya. “For International Revenge Porn Victims, Justice Is Hard to Find.” *Vice.com*, 10 Februari 2020. Diakses 3 April 2020. https://www.vice.com/en_uk/article/k7e74e/for-international-revenge-porn-victims-justice-is-hard-to-find).